

**ANALISIS PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK PADA DESA TANJUNG ATAP DAN TANJUNG
ATAP BARAT DI KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI



**Nama : Indra Agustoni
NIM : 22 2014 241**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK PADA DESA TANJUNG ATAP DAN TANJUNG
ATAP BARAT DI KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Indra Agustoni
NIM : 22 2014 241**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Agustoni

NIM : 22 2014 241

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul skripsi : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2108

The image shows a green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL 20', the serial number 'C6889AFF883700349', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. To the right of the stamp, the name 'Indra Agustoni' is printed in black text.

Indra Agustoni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada
Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat di Kecamatan
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Nama : Indra Agustoni

NIM : 22 2014 241

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal , Agustus 2019

Pembimbing I,


Hj. Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

Pembimbing II,


Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN: 0029097804

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Saya Tidak Akan Pernah Berhenti Ketika Saya Mencoba, Saya Akan Berhenti Ketika Saya Selesai”

(Penulis)

“Be Like The Flower That Gives Its Fragrance to Even The Hand That Crysher It”

(Ali bin Abu Talib)

Dengan Cinta dan Do'a

**Ku Persembahkan Skripsi ini
Khusus Kepada :**

- ♥ *Kedua orang tuaku tercinta*
- ♥ *Kedua Kakek dan Nenekku*
- ♥ *Adik-adiku tersayang*
- ♥ *Keluargaku*
- ♥ *Sahabat seperjuanganku*
- ♥ *Pembimbing skripsiku*
- ♥ *Almamaterku*



Alhamdulillahirabbila'lamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah – Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Desa Tanjung Atap dan Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang Apak (Alm. H. Darul Qutni) dan Umak (Hj. Hasna) serta saudara/i yang telah mendoakan, memberikan inspirasi, motivasi selama menjalankan kuliah dan dukungan agar tetap semangat selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing 1, Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,AK.,M.Si dan Pembimbing 2, Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moral maupun material dalam penulisan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang , beserta Wakil Rektor dan staf yang bertugas.
2. Bapak Drs. H. Fauziah Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Wakil Dekan dan staf yang bertugas.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,AK.,M.Si selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program, Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Palembang.
4. Ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak/ibu Dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
6. Bapak Kades Serta Staff pada kedua desa yang telah banyak membantu dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 2019
Penulis.

Indra Agustoni

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKAAN	10
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengelolaan Keuangan Desa	12
a. Dana Desa.....	12

b. Pengelolaan Keuangan Desa	12
2. Desa	20
3. <i>Good Gavernance</i>	23
a. Pengertian <i>Good Gavernance</i>	23
b. Karakteristik <i>Good Gavernance</i>	24
4. Azaz Pengelolaan Keuangan Desa	26
a. Transparan	26
b. Akuntabel.....	27
c. Partisipatif.....	28
d. Tertib dan Disiplin Anggaran	28
B. Penelitian Sebelumnya	28
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Operasionalisasi Variabel.....	33
D. Data yang Diperlukan	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	36
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	83
A. Simpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Profil Desa Tahun 2018	8
Tabel I.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018	8
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	31
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel IV.1 Lokasi Wilayah Desa Yang Diteliti	39
Tabel IV.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Tanjung Atap Barat	48
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Atap Barat	48
Tabel IV.4 Tingkat Pengembalian Kuesioner	65
Tabel IV. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	65
Tabel IV.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel IV.7 APBDes Tahun 2018	67
Tabel IV.8 Hasil Tabulasi Kuesioner Indikator Perencanaan	68
Tabel IV.9 Hasil Tabulasi Kuesioner Indikator Pelaksanaan	71
Tabel IV.10 Hasil Tabulasi Kuesioner Indikator Penatausahaan.....	74
Tabel IV.11 Hasil Tabulasi Kuesioner Indikator Pelaporan	77
Tabel IV. 12 Hasil Tabulasi Kuesioner Indikator Pertanggungjawaban....	80

DAFTAR GAMBAR

- Gambar IV. 1** Skruktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Atap
Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 44
- Gambar IV. 2** Skruktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Atap
Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Copy Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 2	Surat Selesai Riset dari Tempat Penelitian
Lampiran 3	Foto Copy Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek
Lampiran 4	Foto Copy Sertifikat TOEFL
Lampiran 5	Biodata Penulis

ABSTRAK

Indra Agustoni/222014241/Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat/Akuntansi Sektor Publik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Desa Tanjung Atap dan Desa Tanjung Atap Barat di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada dua desa di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. jumlah responden 40. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada dua desa di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir belum menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mengakibatkan kedua desa tersebut mengalami permasalahan dari segi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

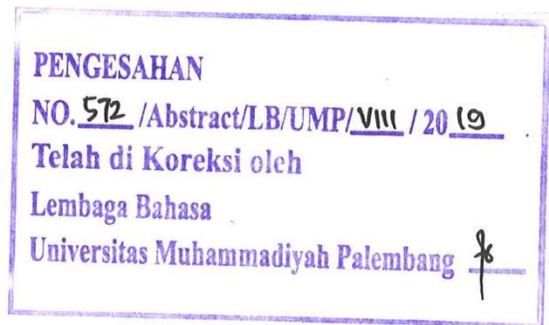
Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ABSTRACT

Indra Agustoni / 222014241 / Analysis of Village Fund Allocation Management to Improve Good Governance in Tanjung Atap Village and Tanjung Atap Barat / Public Sector Accounting

The purpose of this study was to determine the management of village fund allocations to improve good governance in the village of Tanjung Atap and Tanjung Atap Barat Village in Tanjung Batu District Ogan Ilir District. The type of research used in this study was descriptive research. This research was conducted in two villages in Tanjung Batu Subdistrict, Ogan Ilir Regency to improve good governance with indicators of planning, implementation, administration, reporting and accountability. the number of respondents 40. The data used in this study are primary data and secondary data with interview and questionnaire data collection techniques. The results of this study can be concluded that in the management of the allocation of village funds in two villages in Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency has not implemented good governance. This resulted in the three villages experiencing problems in terms of accountability, transparency and participation.

Keywords: Management of Village Fund Allocation to Improve Good Governance



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 demi keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya pada pembangunan.

Pemerintah saat ini sedang giat-giat nya membangun disegala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan Bangsa dan Negara, baik dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, agama serta pemerintah juga mengadakan perbaikan pembangunan infratraktur umum lain nya untuk mendorong peningkatan perekonomian Bangsa Indonesia.

Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk wilayah pemerintahan tersebut adalah kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintahannya Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d, bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, ADD sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Setiap tahun anggaran pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan sebagai ADD pada setiap desa yang ada di negara Indonesia.

Dalam PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang diterima dari dana APBN dan langsung diterima oleh desa. Menurut kementerian desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di tahun 2015, meningkat 6% pada tahun 2016, sampai dengan 2017 hingga mencapai 10% dan dana desa dapat berjumlah hingga 1 Milyar. Dana desa yang besar tersebut menuntut aparatur desa harus dapat mempertanggungjawabkan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Pengembangan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan Nasional. Untuk dapat mengelola dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa

harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Selain itu dalam pengelolaan dana desa Tahun 2015 pemerintah desa juga menggunakan peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015.

Peraturan pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki

keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang dikemukakan diatas untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran desa salah-satunya adalah dengan memperhatikan tahap-tahap pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan tanggungjawab. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib memberikan informasi yang terbuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa bagi masyarakat. ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah ditingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan dalam kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan

berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD) ditengah berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti, dengan mengamati dan mencermati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat diketahui apakah pengelolaan dana tersebut telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) kita dapat definisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada Negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Perkembangan pembangunan di desa jauh lebih lambat dan berkurang dari pada dikota, akses pelayanan publik di kota jauh lebih cepat berkembang dari pada di desa dan dengan demikian pelayanan masyarakat

semakin senjang dari waktu ke waktu akan semakin maju tentu saja perubahan itu ingin di ikuti oleh desa. Perlunya pengawasan dalam pengelolaan ini oleh pemerintah daerah atau pun masyarakat dan tokoh-tokoh desa.

Governance diartikan sebagai cara mengelolah urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *Governance* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelolah sumber daya sosial dan sosial ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara. *Political Governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan

disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Mardiasmo, 2009: 17).

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003. Pada 2013, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir mencapai 450.933 jiwa atau 117.783 kepala keluarga dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2 persen.

Kecamatan Tanjung Batu adalah sebuah kecamatan yang berada dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, luas wilayah kecamatan Tanjung Batu 26.375 Ha dan kecamatan ini mempunyai 2 kelurahan dan 19 desa. Adapun penelitian ini dilakukan 2 desa di kecamatan Tanjung Batu yakni desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat.

Tabel I.1
Profil Desa Tahun 2018
Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat

No	Keterangan	Tanjung Atap	Tanjung Atap Barat
1	Jumlah Penduduk	2.051	2.053
2	Jenis Kelamin :		
	Laki-laki	1.035	1.060
	Perempuan	1.016	993
3	Pendidikan Terakhir :		
	Tidak Sekolah	659	648
	SD	556	392
	SMP	562	571
	SMA	221	371
	Kuliah	53	71

Sumber : Peneliti, 2019 (diolah)

Desa Tanjung Atap memiliki kisaran luas wilayah 173,9 Ha dengan jumlah penduduk kisaran 2.051 jiwa dan Desa Tanjung Atap Barat memiliki kisaran luas wilayah 242,2 Ha dengan jumlah penduduk 2.053 jiwa.

Tabel I.2
Alokasi Dana Desa
Tahun 2018

No	Desa	Pendapatan Dana Desa	Belanja Dana Desa	Surplus/Defisit
1	Tanjung Atap	1.149.558.000	1.181.707.400	-32.149.400
2	Tanjung Atap Barat	1.091.386.000	1.183.054.800	-91.668.800

Sumber : APBDes 2018 Kecamatan Tanjung Batu

Berdasarkan tabel I.2 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 pada setiap desanya, yaitu desa tanjung atap dan tanjung atap barat mengalami defisit yaitu sebesar Rp 32.149.400 pada desa tanjung atap dan Rp 91.668.800 pada desa tanjung atap barat. Hal ini sangat mempengaruhi pembangunan pada desa tanjung atap dan desa tanjung atap barat.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan pengelolaan kebijakan Dana Desa (DD) terutama dalam perencanaan pembangunan di Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat ditenggarai masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat selama tahun 2018, informasi untuk perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan selama ini, belum adanya kejelasan dari pemerintah desa tentang penggunaan dana tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa mengontrol kemana arah Dana Desa (DD) yang telah direncanakan pemerintah desa karena kurang transparannya perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut, mengakibatkan terdapat beberapa pembangunan yang kurang efektif karena kurangnya pengawasan dari masyarakat tentang perencanaan pembangunan tersebut dan kurangnya tanggung jawab dari pemerintah desa terhadap kemampuan sumber daya manusia untuk memahami program-program yang dicanangkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan Dana Desa (DD) itu untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Meningkatkan**

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah Pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik pada desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Desa Tanjung Atap dan Desa Tanjung Atap Barat di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tata kelola pengelolaan alokasi dana

desa yang baik pada Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pemikiran mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pertimbangan bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menjadi bahan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Hehamahua, Hayati. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences* Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.
- I Wayan Saputra. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Dalam Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE). Volume 6 Nomor 1. <https://media.neliti.com/media/publications/5428-ID-efektivitas-pengelolaan-alokasi-dana-desa-add-pada-desa-lembean-kecamatan-kintam.pdf>
- Jualiato adi. (2013). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan (Studi Komparatif di Desa Mambulu dan Desa Pagaluyon)*. <http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1415>
- Kurniaya Safitri. (2018). *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Butuh Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang*.
- Mardiasmo. (2009) *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluas Dana Desa*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. Jakarta.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung.

Yustika, A.E. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di indonesia-Kerja Teoritis dan Realitas Empiris*. Bayumedia Publishing. Malang.